

BAB III

JARINGAN DIASPORA BUGIS DAN DINAMIKA KERAJAAN BUGIS PAGATAN TAHUN 1842-1900

A. *Spirit Massompe* : Latar Belakang Diaspora Bugis

Keberadaan kantong-kantong suku Bugis di daerah Kutai dan Samarinda di Kalimantan Timur, dan kemudian di daerah dan Pagatan, Kalimantan bagian Tenggara yang berkembang hingga Abad ke-19 dan abad ke-20, memunculkan banyak dugaan dan pendapat. Pendapat pertama diungkapkan pakar Bahasa, Roger F. Mills. Dalam penelitiannya tentang asal nenek moyang orang Bugis, Mills menyimpulkan orang Bugis yang ada di Sulawesi Selatan merupakan gelombang migrasi Austronesia yang berasal dari Kalimantan Timur, yaitu daerah Kutai dan Samarinda atau dari bagian tenggara pulau Kalimantan, yakni Pagatan atau Pulau Laut (wilayah Tanah Bumbu). Wilayah tersebut, mudah dijangkau dengan perahu dari pesisir barat Sulawesi Selatan. Makassar hanya berjarak satu atau dua hari naik perahu layar dari Pulau Laut. ¹

Pendapat ini didukung ahli bahasa lainnya, Adelaars yang mengungkap adanya bukti bukti linguistik baru yang menghubungkan bahasa-bahasa Sulawesi dengan bahasa-bahasa Kalimantan. Berdasarkan sejumlah besar data *fonologis, morfo sintaksis* dan *leksikal*, dapat dibuktikan bahwa kelompok kelompok bahasa *Tamanik*

¹Roger F Mills, "The Recontruction of Proto South Sulawesi", *Archipel*, vol. 10, 1975, hlm.205-224; lihat juga Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006), hlm.45-46.

yang digunakan di daerah timur laut Kalimantan ternyata berhubungan erat dengan bahasa-bahasa Sulawesi Selatan, khususnya Bahasa Bugis dan Toraja. Penjelasan paling logis dari pendapat tersebut adalah karena mereka pernah menghuni pemukiman yang sama. Selain itu, terdapat pengaruh bahasa *Proto* Sulawesi Selatan terhadap Bahasa *Barito Tenggara* di Kalimantan dan Bahasa *Malagasi*. Pendapat Adelaars diperkuat oleh Sirk yang menjelaskan nenek moyang pengguna kelompok Bahasa *Tamanik* dan Bahasa *Proto* Sulawesi Selatan sebelumnya hidup berdampingan di Kalimantan bagian tenggara. Kemudian kelompok Suku *Tamanik* berpindah ke arah barat menuju pedalaman dan kelompok *proto* Sulawesi Selatan bergerak ke timur menyeberangi laut menuju Sulawesi.²

Pendapat berikutnya dikemukakan Jacqueline Linneton, Gene Ammarel dan Kathrin Gray Anderson, suku Bugis di wilayah Kalimantan bagian tenggara dan timur yang bermukim sejak pertengahan abad 18 dan berkembang hingga abad ke-19 dan abad ke-20, berasal dari Sulawesi Selatan. Migrasi Suku Bugis ke Kalimantan ini dilatarbelakangi oleh spirit *massompe'* atau merantau meninggalkan kampung

²*Ibid.*, hlm 46-47. Lihat juga K. Adelaar, "Where does Malay come from? Twenty years of Discussions About Homeland, Migrations And Classifications", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (Leiden: KITLV & Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, 2004), hlm.1-30. Catatan tentang asal suku Melayu ini juga ditulis R. van den Berg, "Some notes on the origin of Malay di-", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (Leiden: KITLV & Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, 2004), hlm.532-554. Demikian halnya kajian tentang pengaruh bahasa terhadap persebaran suku suku di Indonesia, lihat H. Steinhauer, "The Indonesian Language Situation and Linguistics: Prospects and Possibilities" *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, (Volumes of Bijdragen: A Backward Glimpse and a Forward Glimpse 150 no. 4, Leiden, 1994), hlm.755-784.

halaman ke daerah lain.³ Secara etimologi, istilah *sompe'* berasal dari bahasa Bugis yang artinya berlayar. Untuk mendukung pelayaran bepergian jauh digunakan kapal layar. Maka, orang yang berlayar untuk bepergian jauh meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan yang lebih baik biasa disebut *sompe'*. Menurut Abu Hamid, *passompe'* adalah pelaut-pedagang yang berlayar dari pulau ke pulau atau dari satu negeri ke negeri lain. Orang Bugis lekat dengan budaya migrasi karena ketangkasannya berlayar. Hal ini erat hubungannya dengan hukum pelayaran dan perdagangan, seperti kontrak kerja, perkongsian, upah muatan/penumpang, dan utang piutang.⁴

Semangat perantauan itu seperti dijelaskan Abu Hamid, merupakan wujud dari semangat yang gandrung terhadap tantangan. Adrenalin orang Bugis untuk hidup lebih baik terlecut ketika dirinya dihadapkan pada tantangan. Kondisi hidup berpahit-pahit dan bersusah-susah sedapat mungkin dikondisikan untuk memacu diri meraih kehidupan lebih baik. Semangat *survival* orang Bugis di tanah rantau, juga tidak terlepas dari sistem sosial-budaya yang lekat dengan hierarki (kasta), yakni *arung* (bangsawan/juragan) dan *ata* (hamba/orang kebanyakan). Bagi orang kebanyakan yang ingin bebas dari sistem itu atau setidaknya ingin naik kelas sosial, merantau

³Lihat Kathryn Gray Anderson, "The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora" (Disertasi pada University of Hawaii, Agustus 2003), hlm.152-160; Gene Ammarel, "Bugis Migration and Modes to Adaptation in Local Situation", *Ethnology*, vol.41, no. 1, 2002, hlm.75; Jacqueline Linneton, "Passompe' Ugi': Bugis Migrants and Wanderers", *Archipel*, vol. 10, 1973, hlm. 173, bandingkan dengan Kathryn Gray Anderson, *op.cit*, hlm.76.

⁴Lihat Abu Hamid, *Pasompe: Pengembaraan Orang Bugis* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2004), hlm. 2.

adalah salah satu pilihan.⁵ Demikian halnya dengan keberadaan suku Bugis di wilayah Kalimantan, cukup beralasan karena suku bangsa Bugis memang terkenal suku pengembara mengarungi samudera sehingga dikenal sebagai pelaut tangguh dan ulung. Dengan perahu layar *pinisi* dan *lambo* mereka dapat mengarungi samudera hingga ke daerah lainnya.⁶

Selain spirit *massompe'*, diaspora Bugis juga didukung peristiwa pada abad sebelumnya yakni jatuhnya Makassar ke pendudukan VOC pada tahun 1667. Terutama adanya perjanjian Bongaya atau *Cappaya Bongaya* tanggal 18 November 1667 yang ditandatangani Sultan Hasanuddin dan Cornelis Speelman yang tidak memuaskan beberapa pihak, terutama sekutu Kesultanan Gowa-Tallo, seperti Kerajaan Bugis Wajo.⁷ Untuk menghindari kondisi yang mengecewakan atau tidak memuaskan karena ditandatanganinya Perjanjian Bongaya tahun 1667 dan pertikaian antar kerajaan di Sulawesi Selatan tersebut, mendorong banyak kelompok bangsawan Bugis Makassar merantau, bermigrasi atau keluar Sulawesi Selatan. Migrasi bahkan

⁵ *Ibid*, hlm. 6.

⁶ Lihat Aziz Salam & Osozawa Katsuya, "Technological Adaptation in the Transformation of Traditional Boats in the Spermonde Archipelago, South Sulawesi", *Southeast Asian Studies*, vol. 46, No. 2, September 2008, hlm. 200-228.

⁷ Jacqueline Linneton, *op.cit.*, hlm. 173, hlm. 174, lihat juga Leonard Y. Andaya, "The Bugis Makassar Diasporas", *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, vol. 68, part I. lihat juga L. Andaya, "Treaty Conceptions and Misconceptions; A Case Study from South Sulawesi", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 134 (Leiden: KITLV, 1978), hlm.290.

meningkat di tahun-tahun berikutnya ke berbagai wilayah di Asia Tenggara.⁸ Adapun kelompok bangsawan Bugis yang bermigrasi ke luar daerahnya dengan tujuan membangun strategi baru untuk melawan VOC atau membangun harapan guna memulihkan kembali keadaan yang kacau di Sulawesi Selatan. Namun ada juga kelompok yang merintis jalur perdagangan niaga (dagang) yang baru.⁹

B. Jaringan Diaspora La Maddukelleng: “Embrio” Diaspora Bugis dan perkembangannya hingga tahun 1842

Kelompok-kelompok orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang bermigrasi pada abad ke-17 hingga abad ke-19 seringkali termasuk perempuan dan anak-anak. Menurut Andaya, fakta ini mendukung fakta terdapatnya pemukiman orang Bugis di daerah lain di Nusantara yang jauh dari wilayah Sulawesi Selatan. Perang antar kerajaan di Sulawesi Selatan yang terjadi hingga abad ke-19, bukan saja mengakibatkan munculnya redistribusi penduduk di kawasan Nusantara, tetapi ‘gerakan’ ke daerah-daerah terpencil di kepulauan lain yang jauh dari jaringan perdagangan Bugis. Pada periode 1667-1900, gerakan migrasi ke luar daerah Sulawesi Selatan hanya terbatas pada orang-orang Bugis dan Makassar yang terlibat

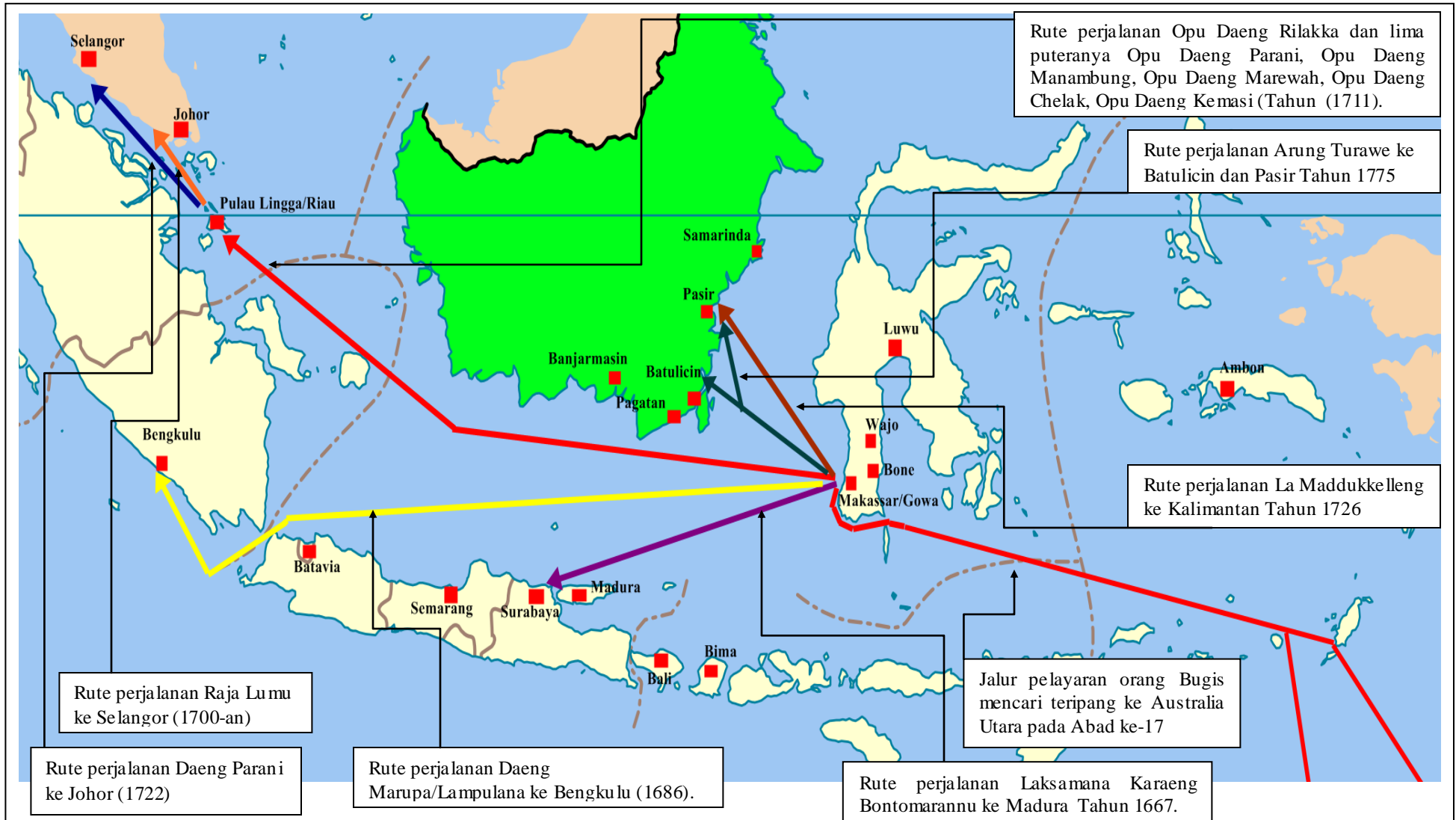
⁸ Pembatasan komersial Belanda dengan melarang orang-orang Makassar berlayar ke Maluku berarti Belanda telah mengibarkan bendera perang dan bertentangan dengan konsep Sultan Alauddin 1607 yang mendeklarasikan negerinya terbuka bagi semua bangsa. Lihat Singgih Tri Sulistiyono, “Konsep Batas Wilayah Negara Di Nusantara: Kajian Historis”, (Artikel hasil penelitian pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro 2009), hlm.229-230.

⁹ Abdul Rahman Patji, *loc.cit.*

dalam perdagangan. Pedagang ini menjelajah nusantara untuk mencari daerah perdagangan sesuai dengan arah angin di musim-musim tertentu, dan kembali ke Sulawesi hanya beberapa bulan setiap tahun untuk memperbaiki perahu mereka.¹⁰ Sebagai perbandingan rute pelayaran kelompok bangsawan Bugis dan pengikutnya dari abad ke-16 hingga abad ke-19 pada peta 3.1.

¹⁰Jacqueline Linneton, *op.cit.*, hlm. 177. Lihat juga Mattulada, “The spread of the Buginese in Southeast Asia” (makalah dipresentasikan pada *National Seminar on Southeast Asia*, Yogyakarta, 3-4 Mei, 1978), hlm.1. Mengenai perahu perahu yang digunakan oleh pengembara Bugis serta pembuatannya secara lebih lengkapnya lihat Horst H. Liebner, “Tradisi Kebaharian di Sulawesi Selatan: Tinjauan Sejarah Perkapalan dan Pelayaran”, dalam Heather Sutherland, *et.al.* (ed), *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan* (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm.78-81.

Peta 3.1. Perbandingan Rute Pelayaran Orang Bugis di Nusantara Abad Ke-16 hingga Abad ke-19.



Sumber: Adaptasi dari penjelasan Kathryn Gray Anderson, "The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora", (Disertasi pada University of Hawaii, Agustus 2003).

Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam proses migrasi ke luar Sulawesi Selatan, biasanya para emigran Bugis dan Makassar sering dipimpin oleh seorang putra raja atau pangeran atau beberapa pengikutnya yang juga keturunan bangsawan. Demikian halnya dengan migrasi suku Bugis di Kalimantan yang dipimpin oleh kalangan bangsawan.¹¹

Jaringan diaspora Bugis pada Abad ke-19, sebenarnya adalah “hasil perkembangan” dari “embrio” diaspora Bugis yang dirintis oleh tokoh La Madukelleng pada tahun 1726. Seperti dituliskan dalam salah satu sumber lokal tentang migrasi orang Bugis ke Kalimantan yaitu naskah lotar sukun wjo (Lontara Sukku’na Wajo) atau biasa disingkat LSW.¹² Dalam LSW diceritakan tentang La Maddukkelleng¹³ adalah seorang bangsawan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan, pada tahun 1700 dan wafat di Wajo, tahun 1765. La Maddukkelleng sering disebut *Arung Singkang* dan *Arung Peneki* karena gelar dari orang tuanya. La Maddukkelleng diperkirakan merantau pada tahun 1714 dengan hanya berbekal atau *tellu cappa* (tiga

¹¹Kathryn Gray Anderson, *op.cit.*, hlm.140-141.

¹²Naskah lotr sukun wjo (Lontara Sukku’na Wajo) atau LSW) ditulis oleh La Sangaji Puanna La Sengngeng, *Arung Bettempola Wajo'* (1764-1767), lihat Andi Zainal Abidin, *The Emergence Of Early Kingdoms In South Sulawesi, A Preliminary Remark on Governmental Contracts from the Thirteenth to the Fifteenth Century*, dalam *Southeast Asian Studies*, Vol. 20, No.4, March 1983, hlm.476. Isi naskah Lontara Sukku’na Wajo tentang La Madukelleng *diunduh* dari “La Madukelleng” (online) ([http:// repository.univ pancasila.ac.id/ index. php](http://repository.univ pancasila.ac.id/index.php), dikunjungi 7 Juni 2012), hlm.1.

¹³La Madukelleng adalah Pahlawan Nasional dari Sulawesi Selatan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 109/TK/1998 tanggal 6 Nopember 1998.

ujung) yang akan dibawa serta yaitu pertama “lemahnya lidahku”, kedua tajamnya “ujung kerisku” dan yang ketiga “ujung kelaki-lakianku”.¹⁴

Setelah malang melintang menjadi bajak laut di wilayah Johor dan Selat Malaka pada tahun 1726, La Maddukkelleng kemudian berlayar menuju ke wilayah Pasir, Kalimantan bagian timur melalui Selat Makassar. Dalam perjalanan rombongan tersebut, La Maddukkelleng bertindak sebagai pimpinan dan mengangkat To Assa sebagai panglimanya. Dalam rombongan La Maddukkelleng tersebut, ikut pula delapan orang bangsawan menengah, yaitu La Mohang Daeng Mangkona, La Pallawa Daeng Marowa, Puanna Dekke, La Siaraje, Daeng Manambung, La Manja Daeng Lebbi, La Sawedi Daeng Sagala, dan La Manrappi Daeng Punggawa.¹⁵

Dalam perantauan ini, La Maddukkelleng kawin dengan puteri Raja Pasir, Andin Anjang atau Andeng Ajeng, putri dari Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana Sultan Aji Muhammad Alamsyah (1703-1726). Ketika Sultan wafat, istri La Maddukkelleng, Andin Anjang dicalonkan menjadi Ratu Pasir, namun sebagian orang-orang Pasir menolak pencalonan tersebut dan terjadi pemberontakan. Untuk

¹⁴“Naskah Lontara Sukku’na Wajo (LSW)”, hlm. 2, lihat juga J. Noorduyn, “Een Boeginees geschriftje over Arung Singkang” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITLV & Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, 1953), hlm.144-152. Dalam masyarakat Bugis istilah tiga ujung atau *tellu cappa* diaplikasikan dalam melakukan proses adaptasi di perantauan (penduduk yang didatangi). Pertama menggunakan *cappa lila* (ujung lidah) disini ditekankan kemampuan melakukan diplomasi. Jika diplomasi dianggap tidak mempan maka dilakukan langkah kedua *cappa laso* (ujung kemaluan), yakni orang Bugis melakukan proses perkawinan dengan pendudukan asli. Kalau pada akhirnya kedua ujung itu tidak mempan, maka ditempuhlah jalan terakhir menggunakan *cappa kawali* (ujung badik) atau melakukan perang.

¹⁵ “Naskah Lontara Sukku’na Wajo (LSW)”, hlm.3.

meredakan keadaan, La Maddukelleng bersama pasukannya menyerang dan menaklukkan Pasir. La Madukelleng menjadi Raja Pasir pada tahun 1726 sampai tahun 1736.¹⁶

Setelah pengembaraan La Maddukelleng ke Pasir, banyak warga Wajo yang mengikuti jejaknya berpindah ke daerah ini. Apalagi pada tahun 1726-an, tanah Wajo telah diduduki oleh kerajaan Bone, banyak pula warga Wajo yang meninggalkan kampung kelahirannya berlayar menuju Pasir dan menetap di Sungai Muara Kendilo. Tempat pemukiman baru tersebut lambat laun menjadi sesak akibat semakin bertambahnya migrasi dari tanah Wajo. Jaringan diaspora Bugis menyebar ke Tanah Kutai yang dipimpin oleh La Mohang Daeng Mangkona pada tahun 1730-an.¹⁷ Kemudian “jaringan diaspora” Daeng Mangkona menyebar ke daerah “Samarenda”

¹⁶ Pada saat itu, pemerintah Kutai dipimpin oleh raja bernama Adji Pangeran Dipati Anom Panji Mendapa Ing Martadipura, tahun 1730-1732. La Maddukkelleng, mempunyai tiga putera, yang kemudian berkeluarga dengan raja-raja di Kalimantan Timur. Ketiga anaknya ialah, Petta To Sibengngareng, Petta To Rawe (Arung Turawe), serta Petta To Siangka. Sementara itu salah seorang puterinya kawin dengan Raja Kutai (Sultan Muhammad Idris). Naskah Lontara Sukku’na Wajo (LSW)”, hlm.3, lihat juga AS Assegaff, *Sejarah Kerajaan Sadurangas Atau Kesultanan Pasir* (Tanah Grogot: Pemerintah Daerah Tingkat II Pasir, 1982), hlm.123-136.

¹⁷ Lihat AS Assegaff, *op.cit*, hlm. 123-136. Mengenai kerajaan Kutai dan hubungannya dengan orang orang Bugis lihat SW Tromp, "Eenige Mededeelingen omtrent de Boegineezen van Koetei", *BKI*, 36 (1887), hlm 167-198. Tanggapan tentang tulisan Tromp mengenai naskah Salasilah Kutai, lihat C. Snouck Hurgronje, "Nog Iets Over De Salasila Van Koetei", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van ederlandsch-Indië*, Deel 37, (Dipublikasikan KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), hlm. 109-120. Lihat juga Knappert, S. C. "Beschrijving van de Onderafdeling Koetei", *Bijdragen tot de Koninklijk Instituut voor Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* (Dipublikasikan KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), hlm.575-637.

yang sekarang menjadi daerah "Samarinda".¹⁸ Dalam *Lontara Sukku'na Wajo* juga diceritakan, setelah sepuluh tahun La Maddukkelleng memerintah Pasir sebagai Sultan Pasir (tahun 1826-1836), datanglah utusan dari Arung Matowa Wajo La Salewangeng yang bernama La Dalle Arung Taa yang mengajak kembali, karena Wajo dalam ancaman Kerajaan Bone. Saat itu La Maddukkelleng menjadi Sultan Pasir, bertekad kembali ke Wajo memenuhi panggilan tanah leluhurnya, meskipun harus menghadapi banyak pertempuran.¹⁹

Jaringan La Madukelleng ini akhirnya menjadi "embrio" berkembangnya diaspora Bugis hingga abad ke-19. Dalam naskah *Lontara Sukku'na Wajo* (LSW), diceritakan bahwa dalam rombongan La Maddukkelleng menuju ke Kerajaan Pasir, Kalimantan bagian timur (sekitar tahun 1726), ikut pula delapan orang bangsawan menengah yang kemudian berdiam di Samarenda, Tanggarong dan Pasir.²⁰ Tidak semua pengikut La Maddukkelleng Arung Singkang mengikuti jejaknya tinggal di

¹⁸"Naskah *Lontara Sukku'na Wajo* (LSW)", hlm.4.

¹⁹ AS Assegaff, *op.cit*, hlm. 123-136; Dalam naskah "*Lontara Sukku'na Wajo* (LSW)", hlm.4, diceritakan La Maddukkelleng kemudian mengumpulkan kekuatan persenjataan dan armada yang berkekuatan perahu jenis *bintak* yang dilengkapi dengan meriam-meriam baru yang dibelinya dari orang-orang Inggris. Anggota pasukan La Maddukkelleng dibagi atas dua kelompok, yaitu pasukan laut (marinir) yang dipimpin La Banna To Assa (kapiteng laut) dan pasukan darat dipimpin Panglima Puanna Pabbola dan Panglima Cambang Balolo. Pasukan istimewa tersebut seluruhnya merupakan orang-orang terlatih dan sangat berpengalaman dalam pertempuran laut dan darat di Semenanjung Malaya dan perairan antara Johor dengan Sulawesi. Pasukan ini terdiri atas suku Bugis, Pasir, Kutai, Makassar serta Bugis-Pagatan.

²⁰*Ibid*, hlm.2.

wilayah Kerajaan Pasir. Seperti diceritakan dalam naskah *lotr kpit l mtoen* (Lontara Kapitan La Mattone) atau LKLM. Salah seorang bangsawan menengah yakni Puanna Dekke, ternyata tidak mau bertempat tinggal di wilayah Pasir tetapi berlayar kembali ke wilayah perairan Sungai Kusan yang bernama *pamagatan* tahun 1735.²¹ Ketertarikannya kepada daerah *Pamagatan* mendorong Puanna Dekke menghadap ke ibukota Kerajaan Banjar (Martapura) yang saat itu diperintah Panembahan Kaharuddin Halilullah. Panembahan setuju orang Bugis membuka daerah *pamagatan* namun sebagai “prasyarat” kesanggupan Penna Dekke untuk menanamkan “investasi” untuk biaya pembangunan pemukiman baru di atas lahan hutan belantara tersebut. Puanna Dekke dapat menjamin keamanan perairan di Muara Pagatan yang selama ini sering digunakan sebagai “markas” para bajak laut. Apabila kedua hal tersebut dapat diwujudkan maka maka Sultan mempersilahkan untuk ditempati sebagai perkampungan orang Bugis yang di kemudian hari dapat diwariskan kepada anak cucu Puanna Dekke.

Puanna Dekke menyanggupinya dan selanjutnya daerah tersebut diberi nama *Kampoeng Pegattang* (dari asal kata dari tempat *pemagatan* atau pemotongan rotan), belakangan berubah nama menjadi *Pagatan*. *Kampoeng Pagattang* berkembang menjadi salah satu bandar kecil yang strategis karena berbatasan Laut Jawa dan dilalui oleh Sungai Kusan. Hal yang mendukung cepatnya perkembangan *Kampoeng*

²¹ Naskah *lotr kpit l mtoen* (Lontara Kapitan La Mattone/ LKLM) ditulis oleh La Mattone Menteri Kerajaan Pagatan dan Kusan, ditulis 21 Agustus 1868, koleksi Keturunan Raja Pagatan terakhir H. Andi Usman, hlm.1-2. Dalam Bahasa Banjar, kata *Pamagatan* berarti tempat pembersihan dan pemotongan rotan. Nama inilah yang kemudian berkembang menjadi nama *Pagatan*.

Pagatang, menurut Anderson karena sebelum dibuka oleh Puanna Dekke tahun 1735, sebenarnya sudah ada beberapa orang Bugis dan Banjar yang bertempat tinggal di Pagatan sejak tahun 1729 sehingga kampung tersebut cukup ramai. Orang-orang Bugis bermata pencaharian memancing (nelayan), mengolah rotan dan berdagang.²²

Terdapat beberapa versi berbeda mengenai waktu kapan didirikannya kerajaan Pagatan. Versi pertama, menurut Eisenberger, yang menjelaskan bahwa pada tahun 1750 Pagatan dibangun oleh orang Bugis.²³ Kemudian versi yang kedua, menurut C. Nagtegaal, hanya menyebutkan bahwa Pagatan dibangun pada pertengahan abad ke-18 oleh seorang pedagang Bugis dari Wadjo (Zuid West Celebes) bernama Poewana Deka, dan atas izin Sultan Banjarmasin.²⁴ Sementara itu dalam *Lontara Kapitan La Mattone*, disebutkan bahwa pedagang Bugis dari Wajo Sulawesi Selatan tiba di Pagatan pada tahun 1735 yang dipimpin oleh Puanna Dekke.²⁵ Dari ketiga pendapat tersebut yang paling mendekati kebenaran menurut penulis adalah tahun 1735 sesuai versi *Lontara Kapitan La Mattone*, karena bila dibandingkan dengan tahun pelayaran

²²K.G. Anderson, *op.cit.*, hlm.159.

²³Eisenberger, *Kroniek Zuider en Oosterafdeling van Borneo* (Banjarmasin: Liem Hwat Sing, 1936), hlm.14.

²⁴C. Nagtegaal, *De voormalige Zelfbesture Noe En Gouvernements Landshappen In Zuid-Oost Borneo* (Utrecht: N.V.A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1939), hlm.3. Keberadaan Pagatan memang memiliki hubungan yang erat dengan wilayah Wajo dan Soppeng sebagai asal para migran di wilayah Pagatan. Lihat juga K.G. Anderson, *op.cit.*, hlm.158.

²⁵“Naskah Lontara Kapitan La Mattone”, hlm.2.

La Maddukelleng ke Pasir tahun 1726 (menurut versi LSW), rentang waktunya tidak terlalu jauh.

Dari *Kampoeng Pagattang* akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya identitas *to-Ugi'* yang menjadi ciri khas orang-orang Bugis Pagatan. Identitas ini terwujud dalam pengaturan pemerintahan internal di *Kampoeng Pagattang* yang berbeda dengan tradisi *Tana Ugi'*.²⁶ Walaupun Puanna Dekke menjadi pionir yang membuka dan mengembangkan kampung Bugis tersebut, ternyata Puanna Dekke tidak mau menjadi raja. Kemungkinan hal ini disebabkan karena Puanna Dekke hanyalah keturunan bangsawan menengah dari Wajo. Selanjutnya Puanna Dekke mengundang saudaranya Pua Janggo dan La Pagala dari Kalimantan bagian barat untuk membicarakan pemimpin Bugis yang bisa mengatur kampung ini. Perundingan tiga bersaudara ini akhirnya menyiapkan Hasan Panggewa (La Pangewa) sebagai calon raja Pagatan pertama, Hasan Panggewa sendiri ketika itu masih berumur belia termasuk keturunan salah seorang Raja Kampiri di Wajo, Datu Lompulle'.²⁷

Dalam *Lontara Kapitan La Mattone*, juga diceritakan saudara Puanna Dekke, Pua Janggo lalu bertolak ke Tanah Bugis menjemput cucunya bernama La Pangewa, turunan anak Raja di Tanah Bugis (Daerah Kampiri, Wajo) untuk dibawa ke

²⁶Mengenai nama "Kampoeng Pagattang", lihat Solomon Muller, "Reis in Het Zuidelijk Gedeelte van Borneo, Gedaan in Het Jaar 1836", *Reizen in Onderzoekingen In Den Indischen Archipel*, Eerste Deel (Amsterdam: Frederik Muller, 1857), hlm.301. Hal yang sama juga dikemukakan dalam wawancara dengan M. Kasran Hamid, Anggota Lembaga Ade Ugi' Pagatan, Jl. 7 Februari RT.8, No.9, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 24 Maret 2012.

²⁷"Naskah Lontara Kapitan La Mattone", hlm.2.

Pagatan. Setelah dikhitan dan dikawinkan, La Pangewa dinobatkan menjadi Raja Pagatan pertama. Karena masih belia, pemerintahan untuk sementara dipercayakan kepada pamannya Raja Balo, sambil mendidik dan membimbing La Pangewa untuk bisa menjadi pemimpin dan mengatur pemerintahan setelah dewasa.²⁸

Mengenai La Pangewa menurut K.G Anderson, penunjukannya menjadi raja Pagatan ditujukan untuk membina hubungan baik dan ikatan kekeluargaan dengan daerah asal di Sulawesi Selatan. Pada masa kepemimpinannya, pemukim orang orang Wajo membuka wilayah yang berdekatan dengan *Kampoeng Pegattang* yang bernama *Kampoeng Baroe*. Sementara orang Banjar yang sebelumnya berada di Pagatan banyak yang pindah ke wilayah hulu di wilayah Kusan.²⁹

Dalam dinamika politiknya, Kerajaan Pagatan cukup disegani di wilayah Kalimantan Tenggara karena armada lautnya. Seperti diceritakan dalam naskah *Lontara Kapitan La Mattone*, Kerajaan Pagatan menunjukkan perannya ketika Pangeran Amir atau Pangeran Muhammad Aminullah Ratu Anum Bin Sultan Kuning atau lebih dikenal dengan nama Pangeran Anom pada tahun 1785 memblokade dan mengganggu arus lalu lintas Muara Banjarmasin, menghalang-halangi dan menahan perahu-perahu pedagang yang masuk ke Banjarmasin. Berita itu didengar oleh Puanna Dekke yang segera memerintahkan cucunya La Pangewa menemui Panembahan di Banjarmasin. Setiba di Banjarmasin, La Pangewa diberi tugas untuk

²⁸*Ibid.*

²⁹ K.G. Anderson, *op.cit.*, hlm.159. Juga dari hasil wawancara Bustani Azhar, Anggota Lembaga Ade Ugi' Pagatan, Jl. Panca Serei RT.2, No.35, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 24 Maret 2012.

menggempur Pangeran Amir hingga Pangeran Amir beserta pengikutnya mengundurkan diri ke Kuala Biyajo (wilayah Kuala Kapuas). Atas keberhasilan La Pangewa diberi gelar *Kapitan Laut Pulo* (Pulau Laut) sekaligus pengakuan sebagai raja Bugis Pagatan pertama oleh Panembahan.³⁰

Dengan kepercayaan yang telah diberikan Sultan Banjar kepada Puanna Dekke dan La Pangewa, Kerajaan Pagatan secara politis berada di bawah kedaulatan Kerajaan Banjar (kerajaan vazal).³¹ Kedudukan Kerajaan Pagatan hanya memiliki hak otonomi pengaturan pemerintahan ke dalam, sebagaimana juga kerajaan-kerajaan kecil lainnya yakni Kusan, Batulicin dan Cantung, Sampanahan, Bangkalaan, Manunggal, Cengal, Sebamban dan Pulau Laut. Posisi Kerajaan Banjar merupakan pelindung terhadap kerajaan kecil lainnya yang menjadi vazalnya.

Setelah pengangkatannya menjadi Kapitan Laut Pulo dan Raja Pagatan pertama, La Pangewa memainkan peranan penting dalam menjaga wilayah wilayah Tanah Bumbu dan perairan Kalimantan bagian tenggara dari perompak. Walaupun demikian, ternyata Sultan Banjar (Sultan Sulaiman, pengganti Panembahan Kaharuddin Haliullah) masih memiliki kecurigaan terhadap La Pangewa. Apalagi pada ketika La Pangewa meminta bantuan persenjataan kepada pemerintah kolonial

³⁰*Ibid.* Hal ini berbeda dengan versi KG Anderson yang mengatakan bahwa keluarga La Pangewa memiliki pangkat Kapiten di Sulawesi, sehingga di Pegatan La Pangewa juga dipanggil sebagai Kapitan. K.G. Anderson, *op.cit.*, hlm.159. Jabatan ini semacam panglima laut yang menjaga perairan setempat.

³¹C. Nagtegaal, *op.cit.*, hlm. 20. Menurut versi Nagtegaal, pembukaan daerah Pagatan oleh Puanna Dekke dengan perjanjian membayar upeti tiap tahun ke kerajaan Banjar, berbeda dengan versi *Lontara Kapitan La Mattone*, yang menjelaskan tidak ada sama sekali pembayaran upeti dalam pembukaan tanah Pagatan.

Belanda untuk memerangi bajak laut di wilayah perairan Kerajaan Banjar pada tahun 1805. Sultan Sulaiman mencurigai kalau senjata tersebut nantinya akan dipakai memerangi negeri-negeri vazal Kerajaan Banjar. Seperti di dalam Surat Sultan Sulaiman kepada Willem Bloom tahun 1805.³² Adapun terjemahan kutipan asli tersebut adalah:

(Surat dari Paduka Sultan Banjar Kepada Tuan Blom. Bahwa dengan ikhlas dan kesucian hati yang tiada terhingga, Sultan Banjar mengirimkan salam kepada Tuan Blom dan mendoakan semoga panjang umur. Kemudian daripada itu kami ingin mengabarkan bahwa kami mendapat kabar dari Kapitan Laut Pulo tentang permintaannya untuk memerangi ilanun (bajak laut). Karena itu kompeni jangan begitu percaya dengan perkataannya, karena siapa tahu dia (Kapitan Laut Pulo) berdusta dan barangkali memiliki niat “jahat” (kurang baik) kepada negeri negeri (vazal) Banjar seperti Kotawaringin. Karena itulah masalah Kapitan Laut Pulo kami ingatkan kepada kompeni. Tertulis pada hari Jumat, tanggal 28 Bulan Ramadhan tahun 1220 Hijriyah (20 Desember 1805 Masehi).³³

Menurut K.G. Anderson, raja pertama Pagatan La Pangewa (Kapitan Laut Pulo) diperkirakan memerintah tahun 1761-1838. La Pangewa menikah dengan seorang wanita bernama I Wale' Petta Coa, tetapi tidak diketahui apakah istrinya berasal dari wilayah Pegatan atau Sulawesi Selatan. Perkawinan ini memiliki tiga putra putri yakni La Palebbi', La Paliweng dan Besse' Pegatan. Ketika La Pangewa meninggal tahun 1838, ia digantikan oleh putranya La Palebbi'. Sementara putranya yang lain La Paliweng, kemudian merantau ke Singapura bersama istrinya, I Romba

³²Lihat H.C. Klinkert, “Surat dari Seri Paduka Sultan Banjar Kepada Tuan Blom”, dalam *Bloemlezing uit de Maleische Geschriften, Ten Behoeve van de Gouvernement Inlandsche Scholen en van hen, die het Maleisch met Latijnsch Karakter Behoevenen*, Derde Druk (Leiden: E.J. Brill, 1913), hlm.261-262.

³³ *Ibid.*

Petta Amba'. Dengan asumsi bahwa La Paliweng adalah anak yang kedua, tentunya ia harus sudah menikah pada usia yang sangat muda. Karena La Palebbi' masih terlalu muda untuk menjalankan tugas-tugasnya, sementara Pagatan dikuasakan kepada bibinya, Petta Mabbowongge. Pemerintahannya hanya berlangsung lima tahun dan kemudian La Palebbi' meninggal dunia. Karena kosongnya tampuk pemerintahan, akhirnya saudaranya La Paliweng dipanggil kembali ke Pagatan dan diangkat menjadi raja Pagatan kedua bergelar Arung Abdul Rahim tahun 1838.³⁴

Pemukiman Bugis pertama di *Kampoeng Pagattang* yang dibangun pada tahun 1735, kemungkinan besar sama dengan kampung kuno orang Bugis umumnya, yang terdiri dari sejumlah keluarga antara 10 sampai 200 rumah. Rumah-rumah tersebut biasanya berderet, menghadap selatan atau barat. Jika ada sungai, maka diusahakan agar rumah-rumah tersebut membelakangi sungai. Pusat dari kampung lama merupakan suatu tempat keramat (*possi tama*) dengan pohon beringin besar, dan kadang-kadang dengan satu rumah pemujaan (*saukang*). Selain tempat keramat, pemukiman atau kampung Bugis umumnya memiliki langgar atau masjid sebagai tempat beribadah.³⁵ Sebagai perbandingan dan gambaran visual rumah rumah Bugis

³⁴Lihat AM Noor, *op.cit.*, hlm.92. K.G. Anderson, *op.cit.*, hlm.159.

³⁵Raziq Hasan Hendro Prabowo, "Perubahan Bentuk dan Fungsi Arsitektur Tradisional Bugis di Kawasan Pesisir Kamal Muara, Jakarta Utara (Form and Function Change of the Buginese Traditional Architecture At Kamal Muara Coastal Area, North Jakarta)" (Makalah dipresentasikan dalam International Symposium *Building Research and the Sustainability of the Built Environment in the Tropics*, 14-16 Oktober 2002), hlm.1.

terdapat dalam lukisan Heinrich von Gaffron peneliti Antropologi dan Bahasa pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah Borneo bagian tenggara dan timur pada tahun 1845. Lukisan tersebut berjudul “Het Vorstelijk Paleis van Pagattan (Boeginezen), op de voorgrond een afbeelding van een hanengevecht” (Istana Raja Pagattan abad 19 dengan latar depan istana, penduduk yang sedang menyabung ayam). Lukisan ini dikoleksi *Royal Institute of Linguistics and Anthropology* di Negeri Belanda.³⁶ Lukisan tersebut dapat dilihat dalam gambar 3.1.

³⁶Deskripsi lukisan berjudul “Het Vorstelijk Paleis van Pagattan (Boeginezen) op de voorgrond een afbeelding van een hanengevecht” (Lukisan Istana Kerajaan Pagattan (Bugis), dengan latar depan orang yang sedang menyabung ayam), pelukis: Heinrich von Gaffron, media lukisan: circa tahun 1845, Teknik lukis pensil (potlood). Ukuran Lukisan 19,5 x 25,5 cm. Koleksi: Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden. Lukisan *download* dari (<http://kitlv.pictura-dp.nl/indeks2.php>, dikunjungi 17 Maret 2012).

Gambar 3.1 Lukisan Heinrich von Gaffron berjudul Istana Kerajaan Pagatan Tahun 1845



Sumber: “Lukisan Heinrich von Gaffron” (online), (<http://kitlv.pictura-dp.nl/indexs2.php>, dikunjungi 17 Maret 2012).

Pada lukisan tentang istana kerajaan Pagatan tersebut, menggambarkan bagaimana identitas *to-Ugi* yang terwujud dalam bentuk istana kerajaan yang berbentuk rumah panggung, rumah khas raja-raja Bugis di Sulawesi Selatan. Pada rumah Raja atau *Arung* Bugis Pagatan, rumah utama yang disebut *Soraja Lopu* yang menjadi tempat tinggal *Arung* atau raja. Kemudian beberapa rumah yang ukurannya lebih kecil adalah tempat tinggal keluarga kerajaan. Model rumah-rumah seperti ini umumnya terdapat di daerah yang menjadi Kerajaan Bugis seperti di Wajo dan Bone. Dalam lukisan tersebut juga terlihat bahwa istana Kerajaan Pagatan terdapat di daerah

dataran tinggi dengan latar belakang pohon kelapa yang menjadi salah satu komoditas perkebunan di Pagatan.

Orang Bugis juga mengenal sistem tingkatan sosial yang sangat berkait dengan arsitektur rumah. Fenomena ini pun terlihat dalam arsitektur rumah di wilayah Pagatan tahun 1800-an. Menurut Andi Nuralang, berdasarkan penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin terdapat sisa-sisa bangunan rumah-rumah di wilayah Tanah Bumbu yang dalam Bahasa Bugis disebut *saorjlopu* (*Saorajalopu*) atau *sls* (*Salassa*). *Saoraja* atau *salassa* hanya ditempati oleh *Arung* (raja) yang memimpin pemerintahan. *Saoraja* dapat pula ditempati oleh *Bangsawan* dan/atau keturunan raja yang terdekat (golongan *Anakarung*). Ciri-ciri rumah untuk golongan raja ini, memiliki tiang dengan alas bertingkat di bagian bawah dan dengan atap di atasnya (*sapana*) dengan bubungan bersusun tiga atau lebih. Kemudian golongan *to maradeka* (orang merdeka), memiliki rumah dengan model *sao piti* (*sao-piti*), bentuknya lebih kecil tanpa *sapana*, dan memiliki bubungan yang bersusun dua. Perbedaannya dengan rumah-rumah yang terdapat di wilayah Wajo, rumah Bugis di daerah ini pada umumnya mengenal rumah kalangan *to-maradeka* dengan sebutan *bola*. Selain itu di Wajo terdapat juga rumah *sls brieG* (*salassa baringeng*) yang lantainya rata, ditempati *bangsawan anak cera ciceng*.³⁷

³⁷Lihat Andi Nuralang *op.cit*, hlm.102; Vida Vervaya Rusianti Kusmartono & Andi Nuralang, "Kehidupan Sosial Ekonomi dan Perdagangan di Daerah Pesisir Tenggara Kalimantan Pada abad ke-19 Masehi", *Berita Penelitian Arkeologi* (BPA), No.8 (Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, 2006), hlm.10.

Sementara lukisan Heinrich von Gaffron yang menggambarkan latar depan istana yaitu penyabung ayam, kemungkinan besar adalah keluarga kerajaan Pagatan. Dalam budaya Bugis keberadaan ayam jantan dan sabung ayam adalah unsur identitas *to-Ugi'* yakni pertanda kejantanan seorang laki laki Bugis. Budaya sabung ayam ini sudah berlangsung turun temurun di beberapa kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan seperti Bone, Soppeng dan Wajo.³⁸

Selain Puanna Dekke, tokoh Bugis lain yang turut berperan dalam jaringan diaspora dan membuka wilayah Cantung dan Batulicin adalah Arung To Rawe. Catatan tentang Arung To Rawe bersumber dari naskah lokal yakni *Kitab Raja Raja Pasir* (KRRP). Sayangnya kitab ini tidak diketahui penulisnya dan tahun penulisan. Kitab tersebut menceritakan tentang pemerintahan Raja Pasir, Aji Pati bin Panembahan Adam bergelar Sultan Dipati Anom Alamsyah pada tahun 1768 M (tahun 1213 Hijriyah), kemudian peranan Arung To Rawe membuka wilayah Batulicin, serta perkawinan Arung To Rawe dengan putri Sultan Banjar, Tamjidillah I,

³⁸Mengenai permainan menyabung ayam atau *massaung manuk* adalah dahulu hanya dilakukan para raja dan bangsawan Bugis pada pagi atau sore hari untuk memeriahkan pesta-pesta adat seperti pelantikan raja, perkawinan, dan panen raya. Bahkan, banyak pahlawan Bugis yang sering menggunakan julukan yang sama seperti nama-nama ayam yang terkenal di daerahnya masing-masing, misalnya, I Segong Ri Painaikang, Buleng Lengna Lantebung, Cambang Toana Labbakang, Korona Jalanjang dan lain sebagainya. Lihat Tim Penulis, *Permainan rakyat suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan, 1979/1980), hlm.8.

yaitu Ratu Intan tahun 1775.³⁹ Walaupun dipaparkan secara sederhana tetapi naskah ini secara tersirat menunjukkan adanya difusi⁴⁰ budaya Bugis di wilayah suku bangsa Banjar, Kalimantan bagian tenggara. Hal inilah yang selanjutnya akan membentuk dan “mewarnai” kondisi sosial budaya *to-Ugi* yang bermukim di wilayah Batulicin dan Cantung.

Dalam naskah tersebut juga dituliskan perjanjian antara Sultan Tamjidillah I yang didampingi oleh para pembesar Kesultanan Banjar dengan Arung To Rawe yang juga didampingi oleh para pembesar dan cerdik-pandai kerajaan To Rawe, yaitu wadah *memagat paikat* (Bahasa Banjar, berarti memotong rotan) di dalam wilayah kesultanan Banjar yang terletak di seberang Pulau Laut arah barat sampai arah barat daya. Kemudian, karena wadah *memagat paikat* itu di dalam wilayah kesultanan Banjar, maka ketentuan hukum yang berlaku di Kesultanan Banjar, maka berlaku pula

³⁹ Kitab ini dikoleksi H. Anang Acil bin H Anang Regih di wilayah Pasir Mayang, Grogot. Isi kitab tersebut diceritakan kembali oleh budayawan Kabupaten Pasir yang juga pegawai Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, A.S. Assegaf. Lihat Assegaf, *Sejarah Kerajaan Sadurangas atau Kesultanan Pasir* (Tanah Grogot: Pemerintah Daerah Tingkat II Pasir, 1982), hlm.124-129.

⁴⁰ Mengenai difusi budaya, Difusi yang dimaksudkan adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang dibawa oleh kelompok-kelompok manusia yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan tidak hanya terjadi ketika ada perpindahan dari suatu kelompok manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga dapat terjadi karena individu-individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan itu hingga jauh. Proses difusi budaya terjadi dimana mereka saling mempelajari dan saling memahami antara budaya mereka masing-masing. Difusi ini bersifat hubungan *symbiotic*, yaitu hubungan di mana bentuk dari kebudayaan itu masing-masing hampir tidak berubah. Lihat T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.58-5; Tedi Sutardi, *Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya* (Jakarta: Grafindo Media Pratama), hlm.14.

di *wadah memagat paikat* (Bahasa Banjar, tempat memotong rotan) tersebut. Selanjutnya, semua belanja (biaya) dalam usaha *memagat paikat* itu, di tanggung semuanya oleh Arung To Rawe. Pihak Arung To Rawe berkewajiban menyerahkan uang setiap tahun dua puluh persen (20%) dari nilai harga hasil *pagatannya* menurut harga pasaran Banjarmasin. Terakhir, pejabat-pejabat yang ditugaskan oleh Kesultanan Banjar, bebas memasuki dan memeriksa keadaan dan jumlah *paikat* (rotan) yang telah *dipagat* (dipotong) oleh rakyat Arung To Rawe.⁴¹

Dalam naskah juga diceritakan dalam kunjungan Sultan Tamjidillah I disertai oleh Arung To Rawe meninjau lokasi lain yang menjadi pemukiman Bugis *Pemagat* (pemotong rotan) yang bernama *Batu Licin* (sekarang menjadi *Batulicin*), yang juga terletak di pingiran suatu sungai Batulicin. Sultan Tamjidillah kemudian melanjutkan peninjauannya lagi ke tempat lain yang juga menjadi *wadah* (tempat atau lokasi) pemukiman orang-orang Bugis. Pada wilayah tersebut telah berdiri ratusan buah rumah bertipe Bugis asli, yang bernama daerah *Sabamban*.⁴² Paparan dalam naskah tersebut mengindikasikan bahwa pemukiman di Sabamban sebenarnya telah dibuka

⁴¹Assegaf, *op.cit.*, hlm.126.

⁴²Daerah Sabamban yang dimaksudkan adalah daerah di wilayah Tanah Bumbu (lihat pembahasan tentang kondisi wilayah Sabamban pada bab II). Bleckman pada tahun 1853 melaporkan *landschap* Sabamban berpenduduk sekitar 250 jiwa, tidak termasuk para penambang, kebanyakan orang Banjar dan beberapa orang Bugis. Daerah Sabamban ini menghasilkan intan, emas, batubara, beras, dan kayu. Lihat G.M. Bleckmann, "Iets over het Noodzakelijke en Voorkelige Eener Negerlandshe Vestiging op de Ooskust van Borneo", dalam Jacob swart, *Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën*, (Amsterdam: G. Hulst van Keulen, 1853), hlm.351-355.

oleh orang Bugis pada tahun 1772, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah ini. Daerah Sabamban ini termasuk daerah-daerah pesisir yang diserahkan oleh Sultan Adam pada tahun 1826 kepada Hindia Belanda.⁴³ Dalam naskah tertulis pada tahun 1190 Hijriyah atau 1775 Miladiyah/Masehi, lokasi areal hutan rotan yang telah sekian lama digarap oleh Andi Pasere bergelar Arung To Rawe diresmikan menjadi kerajaan tersendiri di bawah daulat kesultanan Banjar. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Sultan Tamjidillah I dengan satu upacara khusus yang diadakan di ibukota Kerajaan Banjar, Martapura. Dalam upacara ini sekaligus menetapkan rajanya (Ratu) yang pertama adalah puteri beliau sendiri (Permaisuri Arung To Rawe) yang diberi gelar Ratu Intan I.

C. “Daeng Manggading versus Aji Pati”: Konflik Suku Bugis dengan Masyarakat Lokal tahun 1844-1847

Pertikaian antara penduduk lokal, yakni Aji Pati (Raja Bangkalaan) dengan orang-orang Bugis Batulicin yang dipimpin Daeng Manggading juga mewarnai diaspora orang-orang Bugis di Kalimantan bagian tenggara pada tahun 1844. Dalam Laporan Politik Hindia Belanda tahun 1839-1848, pertikaian ini dikenal dengan Kasus Sebuli–Batulicin. Peristiwa ini adalah aksi perompakan yang menyebabkan pertikaian Daeng Manggading yang dibantu Raja Bugis Pagatan dan Raja Sebamban

⁴³Untuk lebih jelasnya lihat Van der Ven, “Aanteekeningen om thent het rijk Bandjermasin”, *Tijdschrift voor Indische taal land en volkenkunde*, Deel 9 (Batavia: Lange & Co), hlm. 99.

dengan Raja Bangkalaan, Aji Pati yang dibantu Pangeran Meraja Nata, Raja Batulicin. Seperti diungkapkan Bambang Subiyakto, terdapat sebuah kasus perompakan yang terjadi pada tahun 1844, menimpa sebuah kapal dagang Bugis asal Batulicin. Kapal itu bermuatan kayu berlayar ke daerah yang dikepalai Aji Pati, yaitu Sebuli (Bangkalaan). Di daerah ini kapal pengusaha Batulicin itu dirampas dan para awaknya dibunuh oleh para perompak yang berkekuatan sekitar 20 buah perahu.⁴⁴

Daeng Manggading selaku tokoh dan pimpinan orang Bugis di daerah Batulicin kepada Aji Pati melakukan tuntutan ganti rugi dan penyerahan para perompaknya. Tuntutan itu tidak ditanggapi pihak Aji Pati. Sekitar tiga setengah bulan setelah peristiwa perompakan, terjadi pembalasan dari pihak Daeng Manggading dengan merompak perahu milik Aji Pati yang sedang lewat di daerah Batulicin. Perahu dagang milik Aji Pati itu berlayar ke arah timur pulang dari Singapura menuju Sebuli. Sebelum sampai ke Sebuli kapal itu memiliki rute yang mau tidak mau harus melalui daerah perairan Batulicin terlebih dahulu yang letaknya lebih ke barat dari Sebuli.⁴⁵

Daeng Manggading dan pengikutnya di Batulicin dalam aksinya merampas seluruh isi perahu dan membiarkan para awaknya meneruskan perjalanan ke timur, menuju Sebuli. Peristiwa itu menggusarkan Aji Pati dan segera mengerahkan sekitar

⁴⁴Bambang Subiyakto, "Perompakan: Sebuah Realitas Historis Abad XIX di Kalsel, dalam Ersis Warmansyah Abbas (ed), *Buku Kenangan Purnatugas M.P. Lambut* (Banjarasin: LPPK dan Banjarasin Post Group, 2002), hlm. 91-92.

⁴⁵*Ibid*, hlm.93.

100 buah perahu ke Batulicin. Pihak lainnya, Raja/Arung Bugis Pagatan memberikan bantuan kepada Daeng Manggading dengan mengerahkan 10 buah perahu berikut pasukannya. Hal yang sama dilakukan oleh Syarif Ali selaku kepala di daerah Sebamban. Pada pihak lain, Pangeran Meraja Nata, yang bermukim di Batulicin mengerahkan pengikutnya membantu Aji Pati dengan menyerang orang-orang Bugis setempat. Peristiwa bentrok fisik antara pihak Daeng Manggading dan Aji Pati yang dipicu oleh dua peristiwa perompakan itu menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Perkampungan Batulicin, terutama permukiman orang Bugis dibakar, sebagian penduduknya meninggalkan daerah itu dan dalam waktu cukup lama menjadi daerah yang tidak aman. Daeng Manggading termasuk orang yang akhirnya meninggalkan Batulicin akibat peristiwa bentrokan itu.⁴⁶

Selain itu, ditemukan pula catatan bahwa di daerah-daerah pantai sebelah Timur seperti Bangkalan, Sambaliung dan Kurau—daerah perairan Pulau Laut—terdapat seorang yang berkuasa, yaitu Aji Jawa/Aji Jawi. Wilayah tersebut merupakan sarang perompak dan Aji Jawa sendiri disebut-sebut sebagai pelindung para perompak Bugis.⁴⁷ Maraknya perompakan yang melibatkan orang-orang Bugis ini disebabkan karena migrasi orang-orang Bugis yang marak pada dekade awal Abad 19 ke pesisir timur dan tenggara Kalimantan. Tidak semua orang-orang Bugis yang bermukim di daerah sepanjang pesisir tenggara Kalimantan bermata pencaharian

⁴⁶*Ibid*, hlm.94.

⁴⁷ ANRI, *Laporan Politik Hindia Belanda Tahun 1837* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1971), hlm. 42.

sebagai petani atau nelayan. Bahkan ada yang bermata pencaharian sebagai penyelundup dan merompak.⁴⁸

D. Dinamika Kerajaan Bugis Pagatan: Antara Penetrasi Belanda dan Kemapanan Pemerintahan *To-Ugi* Tahun 1842-1900

Pemerintahan Kerajaan Pagatan yang sebagai *homebase* orang-orang Bugis yang berdiaspora dari Sulawesi Selatan, berlangsung dari tahun 1735-1912. Pada masa pemerintahan yang berlangsung sekitar dua setengah abad ini cukup berperan dalam menjaga “kemapanan dan kesinambungan” pemerintahan *to-Ugi* khususnya di wilayah Pagatan, Tanah Bumbu. Pemerintahan kerajaan Bugis ini terbagi dalam beberapa masa dan periode. Masa pembentukan kerajaan oleh Puanna Dekke dan pengangkatan La Pangewa (Kapitan Laut Pulo) sebagai raja pertama di Kerajaan Pagatan, yang diperkirakan berlangsung dari tahun 1761-1838. Periode ini disebut dengan masa perintisan Kerajaan Bugis Pagatan dan “cikal bakal” terbentuknya

⁴⁸ P. Setia Lenggono, *Ponggawa dan Patronase Pertambakan di Delta Mahakam, Teori Pembentukan Ekonomi Lokal*, (Disertasi Pada Program Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm.103. Keterlibatan orang Bugis yang berdiaspora ke daerah ini tidak hanya terjadi di Kalimantan tenggara, tetapi juga terjadi di wilayah lain seperti Selat Malaka maupun di wilayah Bali, seperti Nusa Barong. Lihat Sri Margana, "Chapter Six, Nusa Barong Aflame: Free Trading And Resistance On The Island Of Evil, 1772-1800", dalam *Java's Last Frontier: the Struggle for Hegemony Of Blambangan, c.1763-1813*, (Tesis Doktor pada Universitas Leiden, 2007), hlm.177. Ketika bajak laut *tousug* dari Jolo dan Sulu secara berangsur-angsur menarik armadanya dari selat Makassar bagian selatan, orang-orang Bugis mulai mengisi kekosongan tersebut, terutama dipertengahan abad-19. Lihat James Francis Warren, *The Sulu Zone, 1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asian Maritime State* (Singapore: NUS Press, 2007), hlm. 5-17 & 85-86.

identitas *to-Ugi*. di landschap Tanah Bumbu.⁴⁹ Kemudian masa perkembangan Kerajaan Pagatan dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode pemerintahan raja Pagatan kedua, Arung Pallewange tahun 1838-1855. Kemudian periode integrasi Kerajaan Pagatan-Kusan tahun 1861-1908. Selanjutnya periode kekuasaan Hindia Belanda tahun 1908-1942.

Periode ini adalah masa pemerintahan raja kedua, Arung Abdul Rahim bin Hasan Pengewa yang berlangsung dari tahun 1838-1855. Arung Abdul Rahim dinobatkan menjadi raja Pagatan kedua pada tanggal 19 Juni 1838 kemudian bergelar Arung Pallewange. Ia berkuasa selama 26 tahun hingga kemudian wafat tanggal 28 April 1855. Dalam *Lontara Kapitan La Mattone*, tertulis bahwa Arung Abdul Rahim yang kemudian menurunkan para *Arung* di kerajaan Pagatan.⁵⁰ Sebagai ilustrasi dapat dilihat dari silsilah pada gambar 3.2.

⁴⁹ Pembagian periode dan silsilah raja raja Pagatan berdasarkan “Naskah Lontara Kapitan La Mattone”; C.A.L.M. Schwaner, *op.cit.*, hlm. 346-360; AM Noor, *op.cit.*, hlm 65. Lihat juga J.G.A.Gallois, “Korte Aanteekeningen Gehouden Gedurende eene Reis langs de Oostkust van Borneo verrigt op last van het Nederlansch Indisch Gouvernement”, *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsh Indie*, Vierde deel (Amsterdam: Frederik Muller, Batavia, van haren, Noman en Kolf, 1856), hlm.261-266.

⁵⁰“Naskah Lontara Kapitan La Mattone”, hlm.1-3. Lihat juga Jan van Baal, *Besturen Overzee: Herinneringen van Oud-Ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlandsch-Indie* (Amsterdam: T.Weaver, 1977), hlm. 313. Hal ini juga dikemukakan dalam wawancara Usman Lundrung, Anggota Lembaga Ade Ugi’ Pagatan, Jl.Panca Nenung, RT.3, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 23 Maret 2012; Kemudian dalam wawancara Muhammad Sindong, Anggota Lembaga Ade Ugi’ Pagatan, Jl. Penna Dekke No.9, RT.5, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 22 Maret 2012.

Gambar 3.2. Silsilah Raja Raja Pagatan Tahun 1761-1908



Sumber: Naskah “Lontara Kapitan La Mattone”; C. Nagtegaal, *De voormalige Zelfbesture Noe En Gouvernements Landschappen In Zuid-Oost Borneo* (Utrecht: N.V.A. Oosthoek’s Uitgevers-Maatschappij, 1939); Wawancara Andi Satria Jaya Jl. Arung Abdulrahim no.15 RT.I, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 22 Maret 2012.

Sebagai “vazal” Kerajaan Banjar, maka kondisi politik di wilayah Kerajaan Pagatan tidak dapat terlepas dari kondisi politik di Kerajaan Banjar pada umumnya. Pada tahun 1817 ditandatangani perjanjian antara Banjarmasin dengan pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Ateratieen ampliate op het contract met den Sultan Van Bandjarmasin Van 1 Januarij 1817*, misalnya dalam perkara dua dikatakan :

“Perkara kelima dari kontrak yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi atau tidak dipakai lagi tetapi diganti dengan salinan dibawah ini, Paduka sri Sultan salinkan kepada Raja Belanda yang masyur (terkenal) di sekitar Pulau Tatas dan Kween sampai keseberang kiri Antasan Kecil dan tanah Lawai dan Jelai, dan Sintang, dan Tabanio dan Pagatan dan Pulau Laut dan Kotawaringin dan Pasir dan Kutai dan Berau dan semua daerah rantauan sebagaimana adanya.”⁵¹

Berdasarkan perjanjian tersebut secara tidak langsung sudah menyerahkan wilayah Kerajaan Banjar dalam penguasaan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Penetrasi kolonial Belanda mulai masuk ke pemerintahan Kerajaan Pagatan pada tanggal 19 Juni 1838 ketika Arung La Paliweng menandatangani perjanjian dengan Belanda.⁵² Kemudian menurut Nagtegaal, pada tanggal 22 Maret 1842, pemerintah Belanda menandatangani *Acte van Verbond* dengan Arung Abdul Rahim, yang isinya bahwa kerajaan Pagatan diserahkan kepada Arung Abdul Rahim sebagai *Erfelijck*

⁵¹ANRI, “Ateratieen ampliate op het contract met den Sultan Van Bandjarmasin Van 1 Januarij 1817” no. xx, *Arsip Surat-Surat Perjanjian Antara Kesultanan Banjarmasin Dengan Pemerintahan VOC, Bataafshe Republik, Inggris dan Hindia Belanda 1635 – 1860* (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1965), hlm.196.

⁵²K.G. Anderson, *op.cit.*, hlm.160.

Leen atau pinjaman turun temurun dan Baginda mendapat gelar *Aroeng Palewan Abdoel Rachim bin Hassan*.⁵³

Ada beberapa catatan mengenai aktivitas pelayaran dan perdagangan orang Bugis di masa Arung Abdul Rahim Pallewange. Seperti terdapat dalam laporan Van der Ven tahun 1846. Van der Ven menyebutkan mengenai berbagai komoditas produk kesultanan Banjarmasin atau pemerintahan Karesidenan Kalimantan bagian Tenggara yang diekspor meliputi sarang burung, kayu gaharu, kapas, kelapa, minyak, tembakau, gula aren, telur, pisang, sirih, lilin, cadik perahu, perahu, buah-buahan, sarung tenun, katun, tanduk rusa, tembikar, kerajinan rotan, tikar, sirap, kayu ulin, berbagai jenis kayu, bambu, ikan, sagu, indigo, kerbau, kambing, ayam dan itik. Jenis komoditas impornya adalah garam, gambir, asam dan bawang, tembikar, porselin, kerajinan dari bahan logam (besi, tembaga dan timah), peralatan tenun, kerajinan kertas, gadung, katun dan sebagainya.⁵⁴ Dari semua komoditas ini, hasil alam rotan dan lilin adalah komoditas utama yang dihasilkan di daerah Pagatan, Tanah Bumbu.⁵⁵

⁵³ AM Noor, *op.cit.*, hlm.92, lihat juga *Ikhtisar Politik Hindia-Belanda Tahun 1839-1848*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1973), hlm. xc.

⁵⁴ Bambang Subiyakto, “Penyelundupan dan perdagangan Gelap di Wilayah Perairan Kalimantan Selatan Pada Abad XIX (Bahan Ajar Muatan Lokal)”, *Vidya Karya Tahun XXI*, No.1, April 2003), hlm.96. Lihat juga Van der Ven, “Aanteekeningen om thent het rijk Bandjermasin”, *Tijdschrift voor Indische taal land en volkenkunde*, Deel 9 (Batavia: Lange & Co,tt), hlm.80.

⁵⁵ Pieter Johannes Veth, *Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch Indie* (Amsterdam: Van Kampen, 1869), hlm. 637.

Seperti yang termuat dalam laporan tersebut juga, pada tahun 1846 terdapat dua kapal bermuatan rotan dan lilin berlayar dari Pagatan ke Singapura. Salah satu kapal adalah milik Sultan Pagatan.⁵⁶ Selanjutnya mengenai ekspor rotan dari daerah ini disebutkan hanya mencapai 6000 helai pada tahun 1846 tersebut. Sultan mendapat masukan dari pajak ekspor rotan sebesar f.2,50 per 100 helai. Dilaporkan pula bahwa dari Batulicin (*Batoelitjin* dalam ejaan arsip kolonial) ada tiga kali pelayaran ke Jawa juga dengan muatan rotan. Kemudian, dilaporkan mengenai daerah Kutai yang menghasilkan rata-rata 2000 pikul lilin dan satu koyan sarang burung putih per tahun.⁵⁷

Van der Ven juga mengungkapkan nelayan ikan laut seperti dari daerah Pagatan dan Batulicin tahun 1846, mengangkut dan menjual hasil tangkapannya dalam bentuk ikan kering ke Banjarmasin. Perahu nelayan laut (pantai) memerlukan modal sekitar f. 350 dengan perincian anggaran perahu f. 100, jala f. 100, garam dan konsumsi f. 150. Hasil laut lainnya yang biasa diperdagangkan ke luar daerah adalah tripang.⁵⁸ Dalam laporan juga dituliskan, Sultan Abdurrakhim (Arung Abdul Rahim Pallewange) dari Pagatan suatu ketika dalam rombongan besar dengan sekitar 45 perahu besar dan kecil menyeberang ke Pulau Laut pada awal tahun 1846. Tujuannya adalah mendapatkan barang perdagangan di pulau yang baru berpenduduk sekitar 60

⁵⁶ *Ibid.* Tidak disebutkan secara jelas siapa Sultan Pagatan yang dimaksud. Cuma melihat dari tahun dibuatnya laporan tersebut tahun 1864, raja yang memerintah Pagatan adalah Arung Abdul Rahim Pallewange.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.97.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.97.

keluarga itu. Akan tetapi, sultan dan rombongannya di situ hanya berhasil mendapatkan sedikit rotan dan damar untuk dibawa pulang ke Pagatan.⁵⁹

Selain itu, Van der Ven juga mencatat Pagatan merupakan salah satu kesultanan kecil di Borneo Tenggara yang sebagian wilayahnya berupa pantai. Daerah ini hanya menghasilkan gula aren dan beras yang hanya cukup dikonsumsi sendiri. Berbeda dari daerah tetangganya, Pelaihari (Tanah Laut), tidak ditemui banyak ternak di situ, harga seekor kerbau pun pada saat itu sekitar f. 14.⁶⁰ Kemudian Rotan yang terdapat dan diperdagangkan ke luar umumnya berasal dari daerah Kusan. Akan tetapi, seringkali terjadi rotan telah terjual terlebih dahulu di daerah Batulicin dan Sebamban sebelum sampai Pagatan. Daerah ini mempunyai hubungan perdagangan dengan Jawa dan Singapura. Perahu dagang milik sultan dan saudagar di sana sedikitnya tiga kali dalam setahun berdagang ke Jawa.⁶¹

Dari data-data tentang pelayaran tersebut menunjukkan bahwa pelayaran dan perdagangan di Kerajaan Pagatan sudah berkembang. Walaupun sifatnya masih perdagangan kecil-kecilan dan menggunakan kapal layar tradisional, tetapi area pelayaran dan perdagangannya sudah bersifat *inter-insuler*. Pelayaran pedagang Pagatan yang dipimpin oleh sultan sendiri maupun orang kepercayaan sudah menghubungkan antara daerah Pagatan, Jawa hingga ke Singapura. Komoditas utama

⁵⁹*Ibid*, hlm.98.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹*Ibid*, hlm. 99.

yang diperdagangkan adalah hasil hutan seperti rotan dan lilin. Kemudian hasil laut seperti ikan kering dan teripang.

1. Periode Integrasi Kerajaan Pagatan-Kusan Tahun 1855-1908

Pada periode ini, Kerajaan Pagatan di perintah oleh *Arung* Pagatan ketiga, yakni Arung Abdul Karim Bin Abdul Rahim pada tahun 1855-1871. Arung Abdul Karim dinobatkan menjadi raja Pagatan ketiga pada tahun 1855 dengan gelar Arung La Mattunru. Menurut Nagtegaal, Pada masa pemerintahannya terjadi perluasan wilayah kerajaan Pagatan dengan bergabung kerajaan Kusan tahun 1861, sehingga menjadi kerajaan Pagatan-Kusan. Sewaktu Arung Abdul Karim memerintah, baginda dianugerahi sebuah bintang *Ridderkruis v/d Militaire Willemsorde 4e Klas* dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 2 Agustus 1861, Kerajaan Pagatan digabung dengan kerajaan Kusan, yang selanjutnya pada tanggal 22 November 1861, Arung Abdul Karim menandatangani *Politiek Contract* dengan Pemerintah Hindia Belanda yang disahkan oleh *Gouverneur General* (GG) pada tanggal 7 Agustus 1862.⁶² Pada masa pemerintahan Arung Abdul Karim (1855-1871) tidak terdapat sumber-sumber berupa lukisan khusus tentang daerah dan orang-orang Bugis, sebagai dasar untuk menjelaskan kondisi Pagatan di masa pemerintahannya.

Selanjutnya, kiprah Arung Abdul Karim dalam bidang pelayaran dan perdagangan juga dengan mengadakan pelayaran dan perdagangan antar pulau di Nusantara. Seperti catatan laporan Van Der Stok tahun 1863, dalam tulisannya, *Het*

⁶²Lihat AM Noor, *op.cit*, hlm 65.

Eiland Saleier, melaporkan bahwa salah satu pemasukan impor (invoer) di Pulau Selayar adalah impor dari Pagatan sejumlah komoditas dengan total biayanya f 405. Sayangnya van Der Stok tidak merinci barang apa saja yang berasal dari Pagatan tersebut. Hanya saja dalam daftar barang impor di Pulau Selayar⁶³ terdapat dua komoditas yang dihasilkan di wilayah Pagatan yakni rotan dan gambir. Adapun jumlah perahu dari Pagatan terdapat dua buah dengan biaya f 9,5 per satuan komoditasnya.⁶⁴ Selain itu dalam bidang lainnya, bukti monumental pada masa pemerintahan Arung Abdul Karim ini adalah penulisan naskah *Lontara Kapitan La Mattone* yang ditulis pada tanggal 21 Agustus 1868. Penulisnya, La Mattone adalah Menteri Kerajaan Pagatan dan Kusan pada masa Arung Abdul Karim.⁶⁵

Arung Abdul Karim La Mattunru wafat tahun 1871, dan digantikan putranya Arung Abdul Djabbar La Makkaraw, Raja Pagatan keempat yang memerintah pada tahun 1871-1875. Arung Abdul Djabbar bin Abdul Karim dinobatkan jadi raja Pagatan tahun 1871 dan bergelar Arung La Makkaraw. Tidak terdapat catatan tentang pemerintahan Arung Abdul Djabbar karena tidak lama berkuasa yakni hanya sekitar empat tahun kemudian wafat pada tahun 1875.⁶⁶

⁶³Pulau Selayar atau *Seleier* adalah pulau di wilayah paling Selatan Sulawesi yang masuk dalam Karesidenan Zuid Celebes.

⁶⁴NV Van Der Stok, "Het Eiland Saleier", *Tijdschrift Voor Indische Taal Land en Volkenkunde*, Uitgeven Door Het Bataviaasch Genootschap Van Kunsteh en Watenschappen, Deel XV (Batavia: s'Hage & M.Nijhoff, 1866), hlm. 432-435.

⁶⁵Andi Nuralang, *op.cit*, hlm5.

⁶⁶*Ibid*, hlm 65.

Arung Abdul Djabbar La Makkaraw tidak mempunyai keturunan, maka digantikan oleh keponakannya, Arung Ratu Daeng Mangkau (putri dari Arung Pallewange), yang dinobatkan pada tanggal 12 November 1875. Pemerintahan Ratu Daeng Mangkau sebagai Raja Pagatan kelima berlangsung dari tahun 1875-1883. Pada masa pemerintahan Ratu Daeng Mangkau didampingi oleh suaminya Pangeran Muda Aribillah.⁶⁷ Dari ikatan perkawinan inilah lahir keturunan raja Pagatan berikutnya yakni Andi Tangkung dan Andi Sallo (Arung Abdul Rahim). Pada masa pemerintahan Ratu Daeng Mangkau, pemerintah Hindia Belanda kembali mengadakan perjanjian dengan penguasa Pagatan ini. Diantaranya adalah penandatanganan kontrak politik (*Politiek Contract*) dengan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 13 November 1875.⁶⁸

Dalam kontrak politik tersebut, pada bagian pertama menjelaskan tentang penegasan kembali dan dukungan dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pengangkatan Ratu Daeng Mangkai sebagai Raja Pagatan menggantikan Arung Abdul Djabbar. Kemudian bagian kedua, pernyataan tentang daerah Pagatan dan Kusan yang menjadi wilayah kekuasaan Ratu Daeng Mangkau sesuai dengan perjanjian sebelumnya (perjanjian dengan Arung Abdul Karim tahun 1838). Sementara pada bagian ketiga menerangkan tentang pengangkatan raja atau pengganti Ratu Daeng Mangkau selanjutnya harus dengan sepengetahuan Pemerintah Hindia

⁶⁷ Pangeran Muda Aribillah adalah salah seorang raja Kerajaan Cengal dan Batulicin, sebuah kerajaan kecil yang berada disebelah utara Kerajaan Pagatan. Pengeran Muda Aribillah merupakan cucu dari Sultan Banjar Tamjidillah I.

⁶⁸ AM Noor, *op.cit*, hlm 65.

Belanda. Kemudian dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa perdagangan antar pulau diperbolehkan asal membayar pas tahunan dan tidak mengganggu lalu lintas pelayaran dan perdagangan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pihak Kerajaan Pagatan tidak boleh memberikan konsesi dalam bidang pertambangan dan pertanian. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda akan mengenakan pajak, *belastings* dan pungutan lainnya yang berlaku di seluruh wilayah Pagatan dan Kusan.⁶⁹

Ratu Daeng Mangkau menurut anggapan pemerintah kolonial Belanda adalah seorang putri yang arif, bijaksana dalam memerintah. Adil dalam menjatuhkan vonis dan berani berhadapan dengan wakil wakil pemerintah yang mempersoalkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kondisi politik. Sewaktu suaminya Sultan Muda Aribillah ditangkap karena dituduh bersekongkol dengan “berandal-berandal” Tanah Bumbu dan diinternir ke Batavia, maka Ratu Daeng Mangkau mempersiapkan perempuan-perempuan sebagai anak perahu dan bersama mereka menyeberangi Selat Laut ke Kotabaru. Dari Kotabaru lalu ke Banjarmasin untuk mengunjungi Residen. Dari Banjarmasin, baginda menyamar sebagai perempuan biasa dan turut berangkat bersama suaminya ke Betawi. Akan tetapi penyamarannya diketahui, bahwa beliau

⁶⁹ ANRI, “Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indischen Archipel Pegatan en Koesan”, dalam Bijlagen 101. 1-2.J, Tweede Kamer, blz.I, bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling* (BZO), No. 122.

adalah seorang ratu dari Kerajaan Pagatan, maka dibebaskan dari kesalahannya dan kembali ke Pagatan.⁷⁰

Ratu Daeng Mangkau wafat pada tahun 1883. Sementara anaknya bernama Abdul Rahim belum dewasa, maka pemangku kerajaan dipercayakan kepada kakaknya Andi Tangkung.⁷¹ Andi Tangkung dinobatkan menjadi Raja Pagatan keenam pada tahun 1883-1893. Andi Tangkung memangku jabatan kerajaan Pagatan dengan gelar Petta Ratu, selama sepuluh tahun. Pada masa pemerintahannya Andi Tangkung mengatur pemerintahan Kerajaan Pagatan bersama Daeng Mahmud atau Pangeran Mangkubumi. Selanjutnya Andi Tangkung digantikan oleh Arung Abdul Rahim, yang dinobatkan menjadi Raja Pagatan ketujuh dengan gelar kehormatan Andi Sallo. Pemerintahan Arung Abdul Rahim Andi Sallo berlangsung pada tahun 1893 sampai tahun 1908.⁷²

Pada masa pemerintahannya, Arung Abdul Rahim menandatangani *Pegatan en Koesan Suppletoir Contract* tanggal 7 Juni 1893 tentang eksplorasi bahan tambang

⁷⁰AM Noor, *op.cit*, hlm 65.

⁷¹Berdasarkan penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin tahun 2000-an, masih terdapat makam Andi Tangkung di wilayah Pagatan. Makam ini terbuat dari kayu ulin. Makam terdiri dari jirat bertingkat tiga dan sepasang nisan. Jirat makam Andi Tangkung sederhana tanpa hiasan. Nisan berbentuk pipih dengan puncak nisan yang diberi hiasan kerawangan (pahat tembus) motif sulur suluran. Pada permukaan sisi dalam terdapat inskripsi Arab dan lontara (inskripsi Bugis) yang menjelaskan identitas tokoh yang dimakamkan. Lihat Vida Vervaya Rusianti Kusmartono & Andi Nuralang, "Survei Eksploratif Pesisir Pantai Timur Kalimantan 19-30 September 2000" (Laporan Penelitian Arkeologi pada Balai Arkeologi Banjarmasin, 2000), hlm.26.

⁷²AM Noor, *op.cit*, hlm 66.

di wilayah Kerajaan Pagatan dan Kusan. Dalam kontrak tersebut, dituliskan bahwa pihak kerajaan Pagatan Kusan (Arung Abdul Rahim) setuju untuk memberikan lisensi bagi pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan penelitian dan memberikan konsesi pertambangan di wilayah Pagatan dan Kusan. Persetujuan ini mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober tahun 1897. Peraturan dalam kegiatan penambangan yang didirikan tersebut seluruhnya diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan penjualan bahan tambang. Kontrak tambahan ini disetujui dan disahkan pada tanggal 5 Februari 1898.⁷³ Dalam kontrak tersebut pada pasal 1 dijelaskan bahwa manajemen pelabuhan untuk pengangkutan hasil tambang batubara, dan penunjukan polisi pelabuhan serta pangkalan laut semuanya diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian penguasa pelabuhan tersebut adalah para raja-raja yang ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Nama-nama raja yang menandatangani kontrak pertambangan dengan Pemerintah Hindia Belanda terdapat dalam tabel 3.1.

⁷³ANRI, Arsip "Pagatan en Koesan Suppletoir Contract", bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling* (BZO), No. 122.

Tabel 3.1 Raja yang Menandatangani Kontrak Pertambangan Tahun 1899

No	Nama Raja atau Yang Menandatangani Kontrak	Nama Daerah	Tanggal Penandatanganan Kontrak	Tanggal Terbitnya Surat Keputusan
1.	Mohamad Alimoedin	Boeloengan	25 Juli 1899	27 November 1900
2.	Mohamad Siranoedin	Goenoeng Taboer	28 Juli 1899	idem
3.	Mohamad Califatoellah Bajanoedin	Sambalioeng	28 Juli 1899	idem
4.	Pangeran Ratoe Anoem Koesoema Joeda	Kota Waringin	22 Agustus 1899	idem
5.	Pangeran Mangkoe	Pasir	22 September 1899	idem
6.	Aroeng Abdoelrachim	Pagatan en Koesan	25 September 1899	idem

Sumber: ANRI, Arsip "Pagatan en Koesan Suppletoir Contract", dalam *Overeenkomsten met Inlandsche vorsten in den Oost- Indischen Archipel* (I66.7), bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling* (BZO), No. 122.

Selanjutnya dari catatan penjelasan kontrak tersebut, dituliskan bahwa setelah pada 27 Agustus 1898 terjadi kesepakatan kontrak dengan Kutai dimana telah dibentuk manajemen pelabuhan dan polisi pelabuhan di pangkalan laut di daerah tersebut. Selanjutnya akan disusul pembentukan manajemen pelabuhan di daerah daerah Bulungan, Gunung Tabur, Sambaliung, Kota Waringin, Pasir serta Pagatan dan Kusan. Kebijakan ini akan berlaku pada tanggal 27 November 1900.⁷⁴

Pada masa akhir kekuasaan Arung Abdul Rahim telah terjadi kemelut dalam kerajaan Pagatan Kusan. Peristiwa tersebut berawal perseteruan antara dua saudara

⁷⁴ANRI, "Gedrukte stukken van de Tweede Kamer der Staten General Zitting 1898-1899. (166.no.32)". Lihat juga ANRI, "Boeloengan, Goenoeng Taboer, Sambalioeng, Kota Waringin, Pasir, Pagatan en Koesan, Nota van Toelichting", dalam *Overeenkomsten niet inlandsche vorsten in den Oost-Indischen Archipel* (169.12), hlm.11.

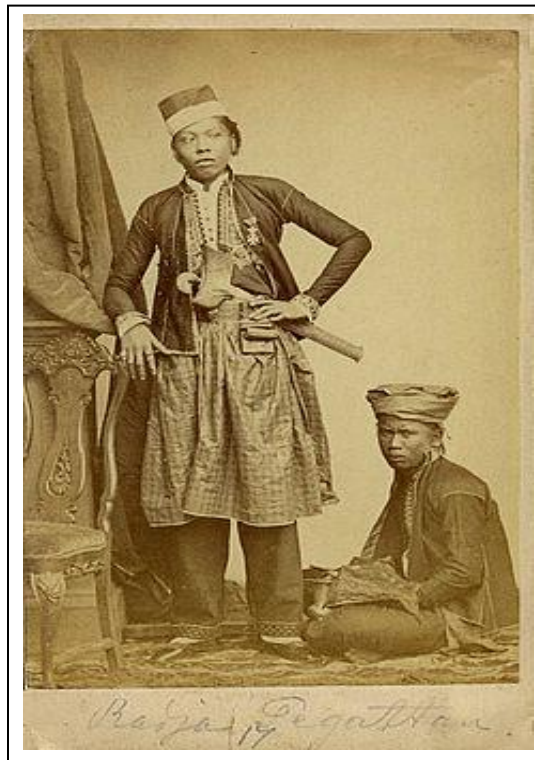
antara Arung Abdul Rahim dan Andi Tangkung. Andi Tangkung mempersiapkan putranya bernama Andi Iwang sebagai pengganti Arung Abdul Rahim Andi Sallo untuk menjadi pemangku kerajaan Pagatan Kusan. Sementara Arung Abdul Rahim Andi Sallo juga ternyata telah mempersiapkan putranya sendiri bernama Andi Kacong⁷⁵ untuk mengantikan dirinya sebagai pemangku kerajaan Pagatan Kusan. Mencermati konflik internal ini akhirnya setahun sebelum wafatnya Arung Abdul Rahim, yakni pada tanggal, 20 April 1907, Arung Abdul Rahim mengeluarkan suatu pernyataan (verklaring) yakni *Verklaring Betreffende de Overdracht van het Landschap Pagatan en Koesan aan het Gouver-Nemen* bahwa kerajaan Pagatan dan Kusan diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda.

Dalam *verklaring* tersebut, Aroeng Abdul Rahim sebagai Raja Pagatan dan Kusan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Hindia Belanda melalui Residen di Banjarmasin menyatakan mengundurkan diri sebagai raja Pagatan dan Kusan. Kemudian akan memberikan sepenuhnya bagian konsesi pertambangan miliknya kepada pemerintah Hindia Belanda dengan kompensasi yang akan ditentukan bersama. Selanjutnya segala peraturan dan kebijakan di *landschap* Pagatan dan Kusan akan diatur sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Pernyataan ini

⁷⁵ Andi Ketjong adalah putra Arung Abdul Rahim dalam perkawinannya dengan Poe Tase, istri pertama. Andi Ketjong bersaudara dengan Andi Parenreng, Andi Sakuncung, dan Andi Rombeh. Sementara perkawinannya dengan istri kedua, keturunannya adalah Andi Wale, Andi Genggong, Andi Wlis, Andi Sundul, Andi Mala, Andi Raming dan Andi Ideham.

ditandatangani di Pagatan pada tanggal 20 April 1907 (1326 Rabiul Awal) dan selanjutnya akan diratifikasi 11 Mei 1912.⁷⁶

Gambar 3.3. Foto Radja/Arung Abdul Rahim Andi Sallo.



Sumber: foto dengan bahan circa, ukuran asli 9,5 x 6,5 cm, identitas yang mengambil gambar (fotografer) tidak diketahui, koleksi *Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde* (KITLV), Netherlands, dalam (www.kitlv.nl/eo), diakses 11 Mei 2011). Koleksi foto yang sama juga masih disimpan Andi Satria Jaya, putra Andi Usman (alm) raja Pagatan terakhir di Pagatan.

Sementara itu dari nota penjelasan pernyataan Arung Abdul Rahim tersebut, pengaturan daerah Pagatan yang merupakan wilayah dalam *onderafdeeling* Tanah Bumbu, akan digabungkan dalam *Afdeeling Zuid Oost Kust van Borneo* berdasarkan

⁷⁶ANRI, “Verklaring Betreffende de Overdracht van het Landschap Pagatan en Koesan aan het Gouver-Nemen”, bundel *Borneo Zuid Oosterafdeeling* (BZO), No. 122.

Staatsblad tahun 1912, no.312.⁷⁷ Dalam *velklaring* tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengapa Arung Abdul Rahim mengundurkan diri dan menyerahkan Kerajaan Pagatan dan Kusan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Kemungkinan karena konflik bersifat internal sehingga tidak dibahas dalam *velklaring*. Arung Abdul Rahim wafat pada tahun 1908. Selanjutnya selama empat tahun yakni tahun 1908-1912, pelaksanaan pemerintahan kerajaan Pagatan dan Kusan di bawah suatu kerapatan (*zelfbestuursraad*).⁷⁸

2. Periode Pemerintahan Hindia Belanda Tahun 1908-1912

Berdasarkan *velklaring* tahun 1908, sejak tanggal 1 Juli 1912 kerajaan Pagatan dan Kusan secara resmi dilebur dalam pemerintahan langsung Hindia Belanda atau menjadi wilayah *Rechtreeks Bestuurgebied*.⁷⁹ Penghapusan sistem pemerintahan Kerajaan di Pagatan dengan terbitnya *Staatblads* 1912 No. 312 oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Sebelum penghapusan Kerajaan Pagatan, kerajaan-kerajaan kecil lainnya di wilayah Tanah Bumbu seperti Cantung, Sampanahan, Manunggal, Cengal, Sebamban dan Pulau Laut telah dihapuskan terlebih dahulu pada

⁷⁷ ANRI, "Pagatan en Koesan, Nota van Toelichtin", bundel *Borneo Zuid Oosterafdeling* (BZO), No. 122.

⁷⁸ Dalam kerapatan tersebut Pemerintah Belanda menunjuk wakilnya, Pangeran Kapitan dan Daeng Soewidi. *Ibid.*, hlm 67. Hal ini juga diungkapkan dalam wawancara Abdul Rahim Gani, Anggota Lembaga Ade Ugi' Pagatan, Jl. Panca Serei RT.2, No.15, Kelurahan Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 20 Maret 2012.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 68.

tahun 1905 dengan terbitnya *Staatsblads* 1903 No. 179. Dengan demikian sejak tahun 1912, semua kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Tanah Bumbu langsung masuk wilayah Pemerintahan Hindia Belanda.⁸⁰

Berdasarkan *Staatsblad* 1903 daerah Kalimantan merupakan satu *gouverment* yang terdiri dari dua karesidenan yaitu Karesidenan *Westerafdeeling Van Borneo* dan Residensi *Zuider-en Oosterafdeeling Van Borneo*. Karesidenan *Westerafdeeling van Borneo* yang terdiri dari empat *afdeeling* yaitu Pontianak, Singkawang, Sintang dan Ketapang. Kemudian Karesidenan *Zuider en Oosterafdeeling van Borneo* dibagi atas *afdeeling* Banjarmasin yang membawahi *onderafdeeling* Pelaihari, Marabahan, Martapura serta Tanah Bumbu dan Pulau Laut. Kemudian *afdeeling* lainnya adalah *Afdeeling* Hulu Sungai, Kapuas Barito serta Samarinda, Bulungan dan Berau. Tahun 1912 wilayah Karesidenan *Zuider en Oosterafdeeling van Borneo* di mekarkan menjadi lima *afdeeling*. Salah satu *afdeeling* tersebut adalah *Afdeeling* Pesisir Borneo Tenggara (*Zuidoost-kust van Borneo*). Wilayah *Afdeeling* Pesisir Borneo Tenggara dibagi atas *onderafdeeling* Pasir, Pulau Laut dan Tanah Bumbu Selatan. Pada tahun 1912 tersebut, kerajaan Pagatan dan Kusan, Batulicin, Sebamban di masukkan ke dalam *onderafdeeling* Tanah Bumbu Selatan yang beribukota di Pagatan. Dengan demikian sejak tahun 1912, di Pagatan berkedudukan seorang kontrolir.⁸¹

⁸⁰ Lihat M.Suriansyah Ideham, *et.al.* (ed), *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm.234.

⁸¹ *Ibid*, hlm 235. Wawancara Abdul Kadir Wellang, Anggota Lembaga Ade Ugi' Pagatan, Jl. Arung Abdulrahim RT.2, No.11, Kelurahan Mudallang Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, 20 Maret 2012.